



# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN



[www.disnaker.magetan.go.id](http://www.disnaker.magetan.go.id)



## DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II.....	6
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	6
2.1. Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah .....	6
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	6
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	13
2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja.....	19
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan .....	31
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Memberikan Pelayanan.....	31
BAB III.....	39
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	39
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah .....	39
3.2. Strategi Perangkat Daerah .....	42
3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	44
BAB IV.....	46
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN .....	46
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah hasil Cascading dari Tujuan, Sasaran, Outcome dan Output.....	46
4.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah mengacu pada Nomenklatur.....	68
4.3. Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah .....	99
4.4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah .....	101
4.5. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) .....	103
BAB V.....	106
PENUTUP .....	106



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat dokumen perencanaan, baik jangka Panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Perangkat Daerah diharuskan menyusun dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan instrumen penting dalam tata Kelola organisasi untuk memastikan pencapaian visi dan misi secara terarah dan terukur dalam jangka menengah. Dalam penyusunannya melibatkan berbagai pihak terkait untuk menghasilkan dokumen yang komprehensif, implementatif, dan responsif terhadap dinamika lingkungan strategis.

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025–2029 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pilihan. Dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Dinas Tenaga Kerja menyajikan agenda utama dalam pelaksanaan pembangunan di Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi dengan segala dinamika perubahan yang diperkirakan akan terjadi selama 5 (lima) tahun mendatang. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja juga menetapkan sasaran–sasaran yang akan dicapai dengan indicator keberhasilan yang dapat diukur. Dengan demikian, Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025–2029 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja serta menjadi pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja.



Fungsi Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja adalah sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan urusan Tenaga Kerja dan Urusan Transmigrasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

## **1.2. Dasar Hukum**

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025–2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);



8. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur 2025-2045;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah



Kabupaten Magetan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 03);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Bupati Magetan No 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan arah pedoman penyusunan program strategis pembangunan Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi selama 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Magetan.

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025-2029 bertujuan untuk merumuskan Gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan, menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Magetan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PEANGKAT DAERAH**

- 2.1. Gambaran Umum Pelayanan



- 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja
- 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
  - 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.2.2. Isu Strategis

### BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
- 3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

### BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

- 4.1. Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah hasil Cascading dari Tujuan, Sasaran, Outcome dan Output
- 4.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah mengacu pada Nomenklatur
- 4.3. Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.5. Target Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

### BAB V PENUTUP



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 2.1. Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah

##### 2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan. Sedangkan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan sebagai berikut:

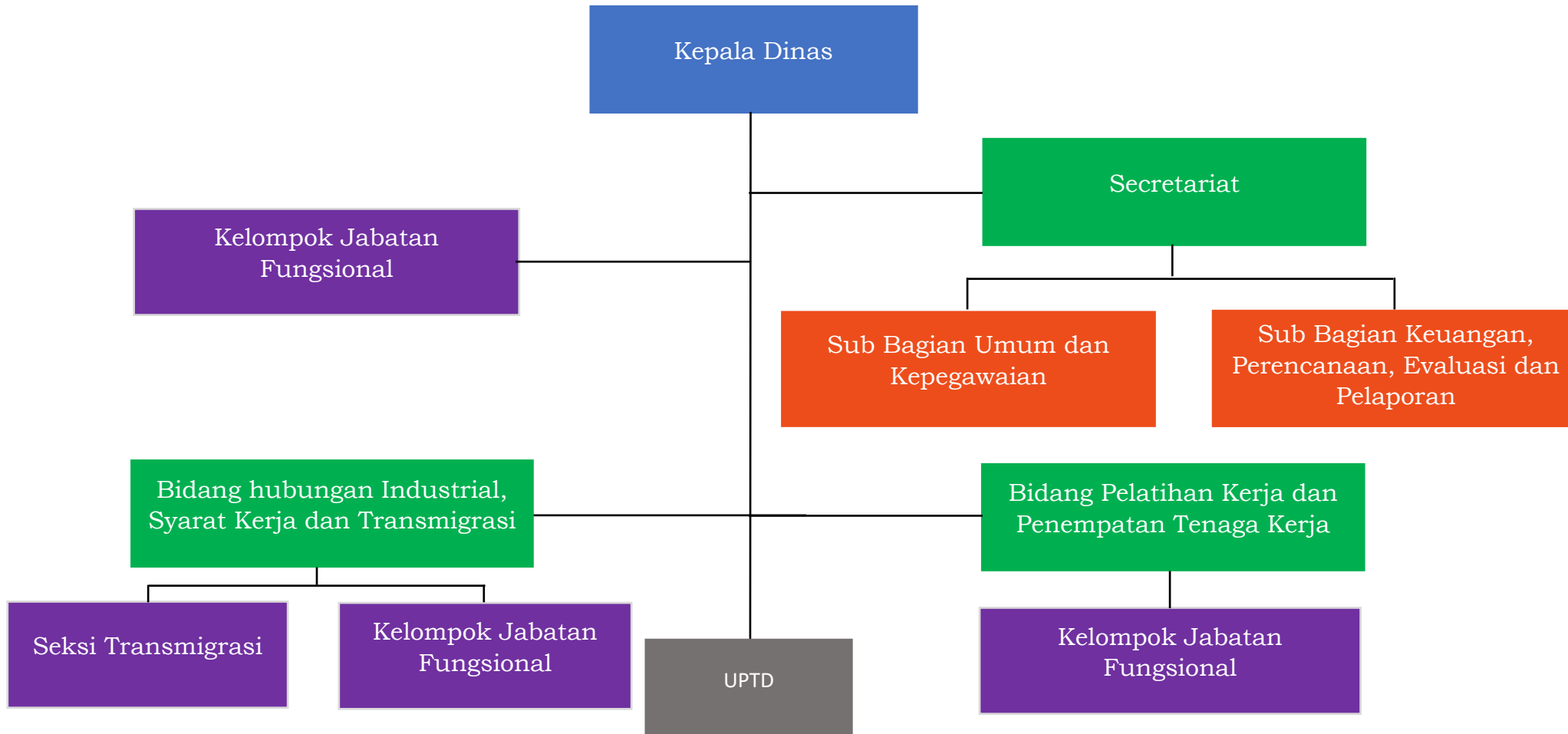
1. Perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahi:
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Transmigrasi, membawahi:
  - a. Seksi Transmigrasi
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional, dan
5. UPTD; dan



**Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan**





Dalam pelaksanaan tugas, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan ditangani oleh Sekretariat dan Bidang yang terdiri dari:

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Masing – masing subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada sekretaris.

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas, sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan urusan surat - menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- b. Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c. Pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;
- d. Pengelolaan urusan kepegawaiaan;
- e. Pengelolaan urusan keuangan;
- f. Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
- g. Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
- h. Pengkoordinasian penyusunan program dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pada bidang; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan surat –menyurat ;
- b. Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- c. Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
- d. Melaksanakan tugas – tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
- e. Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
- f. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat dan pensiun;



- g. Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
- h. Mengurus kesejahteraan pegawai;
- i. Merencanakan pengelolaan arsip; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

1.2 Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas :

- a. Mengoodinasikan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dinas;
- b. Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencna Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kegiatan (Renja);
- c. Mengumpulkan, mengoordinasikan, dan mengolah bahan untuk menyusun Sistem Informasi Pemerintah Daerah SIPD, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (SIRUP);
- d. Menyiapkan data untuk menyusun Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan ( SIRUP);
- e. Mengumpulkan, mengoordinasikan, dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran;
- f. Melaksanakan monitoring dan evalasi plaksanaan program kegiatan Dinas;
- g. Menghimpun, mengoordinasikan, dan mengelola dokumen perjanjian kinerja (PK);
- h. Mengoordinasikan, menghimpun pelaksanaan Standar Pelayanan (SP), Standar Operating Prosedur (SOP), dan Survei Kepuasan Masyarakat ;
- i. Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- j. Melaksanakan tata usaha keuangan;
- k. Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- l. Melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
- m. Melaksanakan tata usaha gaji pegawai;



- n. Menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- o. Menyusun laporan keuangan;
- p. Melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran; dan
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris;

### 1.3 Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja

Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program pelatihan berbasis kompetensi, analisis produktivitas, penempatan kerja dan pengembangan perluasan kerja.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelatihan kerja dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi (PBK);
- b. Pelaksanaan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- c. Pelaksanaan pimpinan peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
- d. Pelaksanaan rekomendasi operasional, perpanjangan dan penambahan program kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- e. Penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
- f. Pelaksanaan koordinasi pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
- g. Pelaksanaan koordinasi pengukuran produktivitas tingkat Kab/Kota;
- h. Pelaksanaan koordinasi pemantauan (Surveillance) tingkat produktivitas;
- i. Pelaksanaan koordinasi pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dan pelayanan antar kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;



- j. Pelaksanaan koordinasi penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- k. Pelaksanaan koordinasi perantara kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- l. Pelaksanaan pemberian rekomendasi operasional kepada lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
- m. Pelaksanaan penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja diluar negeri kepada masyarakat;
- n. Pelaksanaan koordinasi pendaftaran, perekrutan dan seleksi calon PMI;
- o. Pelaksanaan koordinasi pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan PMI ke luar negeri;
- p. Pelaksanaan koordinasi pelayanan penandatanganan perjanjian kerja;
- q. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian permasalahan PMI Pra dan Purna penempatan;
- r. Pelaksanaan koordinasi pelayanan pemulangan dan kepulangan PMI;
- s. Pelaksanaan koordinasi pemberdayaan PMI Purna;
- t. Pelaksanaan tugas penerbitan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) wilayah dalam daerah dan
- u. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

2. Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Transmigrasi (Hubinsyakertrans)

Bidang Hubinsyakertrans mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan hubungan industrial, syarat-syarat kerja, pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta merumuskan dan melaksanakan perpindahan dan penempatan transmigrasi, pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi, pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat transmigrasi.



Adapun fungsi dari bidang Hubinsyakertrans adalah :

- a. Pelaksanaan koordinasi proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup operasi daerah Kabupaten/Kota;
- b. Pelaksanaan verifikasi proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup Kabupaten/Kota;
- c. Pemberian pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama daerah Kabupaten/Kota;
- d. Pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerjasama bipartit di perusahaan;
- f. Pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan diperusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
- g. Pelaksanaan koordinasi kegiatan promosi dan motivasi ketransmigrasian;
- h. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pendaftaran dan seleksi calon transmigran;
- i. Pelaksanaan koordinasi kegiatan perpindahan dan penempatan transmigrasi; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Hubinsyakertrans dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Didalam bidang Hubinsyakertrans terdiri dari 1 (satu) seksi yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hubinsyakertrans. Adapun seksi di bawah bidang hubinsyakertrans sebagai berikut :

2.2. Seksi Transmigrasi mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan pendaftaran dan seleksi calon transmigran;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan pendataan animo calon transmigran;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah asal dan daerah tujuan;



- d. Menyiapkan bahan klarifikasi lokasi permukiman daerah tujuan transmigrasi;
- e. Menyiapkan dan melaksanakan pelatihan dan pendampingan calon transmigran yang terseleksi;
- f. Menyiapkan segala hal yang terkait dengan proses pemeragkatan transmigrasi;
- g. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan perpindahan dan penempatan transmigran;
- h. Melaksanakan pendampingan dan pengawalan transmigran kedaerah tujuan;
- i. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pasca penempatan transmigrasi;
- j. Menyiapkan bahan pendataan permasalahan ketransmigrasian;
- k. Menyiapkan bahan penyelesaian permasalahan ketransmigrasian;
- l. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pasca penempatan transmigrasi;
- m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan ketransmigrasian; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### **2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

#### **2.1.2.1 Sumber Daya Manusia**

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 35 orang, dengan rincian 25 orang PNS, 4 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan 6 Tenaga Harian Lepas. Data mengenai komposisi pegawai Dinas Tenaga Kerja secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.1.



Tabel 2.1

**Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan, Jenis Kelamin, Pendidikan dan Golongan Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan**

Jabatan	Jenis Kelamin		Pendidikan						Golongan			
	L	P	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	I	II	III	IV
Kepala Dinas	1							1				1
Kepala Bidang Pelatihan Kerja Dan Penempatan Tenaga Kerja	1							1				1
Kepala Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja Dan Transmigrasi	1						1				1	
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian		1				1					1	
Kepala Seksi Transmigrasi	1						1				1	
Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan	1							1			1	
Penata Layanan Operasional		1					1				1	
Instruktur Ahli Muda	1						1				1	
Pengantar Kerja Ahli Muda		1					1				1	
Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda	1						1				1	
Analisis Tata Usaha		1					1				1	
Bendahara		1				1					1	
Analisis Tenaga Kerja	1						1				1	
Analisis Bahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	1						1				1	
Analisis Tenaga Kerja	1						1				1	



Jabatan	Jenis Kelamin		Pendidikan						Golongan			
	L	P	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	I	II	III	IV
Pengelola Keuangan	1					1					1	
Pengelola Perlindungan Dan Pemberdayaan TKI	1					1					1	
Instruktur Ahli Pertama	1						1				1	
Instruktur Ahli Pertama		1					1				1	
Analisis Hukum Ahli Pertama	1						1				1	
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama		1					1				1	
Jf Pengantar Kerja Ahli Pertama		1					1				1	
Fasilitator Pemerintahan		1					1				1	
Fasilitator Pemerintahan		1					1				1	
Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	1						1				1	
Fasilitator Pemerintahan		1					1				1	
Pengelola Teknologi Informasi		1				1				1		
Juru Pungut Kebersihan	1			1						1		
Pengadministrasian Perkantoran		1			1					1		
Tenaga Administrasi	1						1					
Tenaga Keamanan	3				3							
Tenaga Kebersihan	1				1							
Tenaga Supir	1				1							
<b>Jumlah</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>26</b>	<b>0</b>



Tabel 2.2

Sumber Daya Manusia yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Uraian	Jumlah
1	Diklatpim III	1
2	Diklat PKP	2
3	Diklat PKA	1

**2.1.2.2 Sarana dan Peralatan Kerja**

Dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada Masyarakat Disnaker Magetan selain didukung oleh adanya sumberdaya manusia juga tidak lepas dari kepemilikan asset sebagai berikut :

Tabel 2.3

**Daftar Aset Tetap Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan**

No. Urut	Kode Barang	Nama Barang / Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Nilai (Rp)
1	0203010103	Station Wagon	2	Unit	478.538.750
2	0203010302	Pick Up	1	Unit	164.750.000
3	0203010501	Sepeda Motor	9	Unit	141.820.000
4	0204010119	Mesin Las Listrik	2	Unit	39.120.840
5	0204010131	Mesin Genset	1	Unit	17.500.000
6	0204021103	Rol Meter	20	Buah	1.410.000
7	0204030910	Bejana Ukur	1	Buah	14.800.000
8	0206010402	Rak Besi/Metal	6	Unit	18.000.000
9	0206010404	Filling Besi/Metal	1	Unit	3.050.000
10	0206010406	Brankas	1	Unit	2.500.000
11	0206010409	Rotary Filling	4	Unit	9.016.480
12	0206010412	Lemari Kaca	2	Unit	9.543.880
13	0206010505	Alat Penghancur Kertas	2	Unit	5.112.800
14	0206010507	Papan Pengumuman	1	Unit	2.000.000
15	0206010510	White Board	2	Unit	2.300.000
16	0206010540	Jaringan CCTV	1	Unit	17.000.000
17	0206010542	LCD Proyektor	2	Unit	15.590.000
18	0206020101	Lemari Kayu	8	Unit	12.784.000
19	0206020104	Meja Kayu/Rotan	5	Unit	8.608.980
20	0206020105	Kursi Besi / Metal	78	Unit	36.528.791
21	0206020106	Kursi kayu/Rotan/Bambu	13	Unit	4.097.260
22	0206020107	Zice	1	Unit	750.000
23	0206020110	Meja Rapat	13	Unit	32.750.000



<b>No. Urut</b>	<b>Kode Barang</b>	<b>Nama Barang / Jenis Barang</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Satuan</b>	<b>Nilai (Rp)</b>
24	0206020111	Meja Tulis	28	Unit	22.995.000
25	0206020127	Kursi Rapat	15	Unit	11.482.500
26	0206020128	Kursi Tamu	2	Unit	9.100.000
27	0206020130	Kursi Putar	12	Unit	12.791.500
28	0206020131	Kursi Biasa	75	Unit	5.308.333
29	0206020137	Meja Komputer	1	Unit	457.500
30	0206020148	Meja 1/2 Biro	2	Unit	2.783.610
31	0206020165	Kursi Tunggu	2	Unit	6.348.100
32	0206020303	Mesin Potong Rumput	1	Unit	4.750.000
33	0206020401	Lemari Es	1	Unit	1.600.000
34	0206020403	AC Unit	14	Unit	55.300.000
35	0206020404	AC Split	1	Unit	4.050.000
36	0206020406	Kipas Angin	4	Unit	3.475.350
37	0206020603	Televisi	3	Unit	10.690.000
38	0206020606	Equalizer	1	Unit	4.500.000
39	0206020607	Loudspeker	1	Unit	6.800.000
40	0206020608	Sound System	1	Unit	9.000.000
41	0206020612	Wireless	3	Unit	7.925.000
42	0206020614	Microphone	1	Unit	4.000.000
43	0206020624	Mesin Jahit	18	Unit	72.832.500
44	0206020637	Tangga Aluminium	1	Unit	1.500.000
45	0206020640	Mimbar/Podium	1	Unit	3.500.000
46	0206020649	Handy Cam	4	Unit	15.831.001
47	0206020650	Digital Video Disk Player (DVD)	2	Unit	1.050.000
48	0206020701	Alat Pemadam/Portable	1	Unit	1.750.000
49	0206020716	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	2	Unit	1.860.000
50	0206030201	P.C. Unit	11	Unit	109.715.101
51	0206030202	Lap Top	15	Unit	127.633.501
52	0206030203	Note Book	1	Unit	7.360.000
53	0206030408	Printer	1	Unit	2.250.000
54	0206030415	Finger print	1	Unit	10.524.250
55	0206030501	CPU	1	Unit	2.050.000
56	0206030502	Monitor	2	Unit	8.800.000
57	0206030503	Printer	20	Unit	50.481.002
58	0206030504	Scanner	1	Unit	7.350.000
59	0206030604	Modem	1	Unit	1
60	0206040104	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	4.000.000
61	0206040105	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	Unit	9.450.000
62	0206040106	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	Unit	9.600.000
63	0206040108	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	Unit	3.100.000
64	0206040211	Meja Tamu Biasa	5	Unit	15.000.000



<b>No. Urut</b>	<b>Kode Barang</b>	<b>Nama Barang / Jenis Barang</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Satuan</b>	<b>Nilai (Rp)</b>
65	0206040308	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	Unit	1.034.000
66	0206040705	Lemari Buku untuk untuk Perpustakaan	1	Unit	10.000.000
67	0206040706	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	4	Unit	44.525.150
68	0207010140	Microphone/Wireless Mic	1	Unit	4.500.000
69	02070102100	Camera Digital	4	Unit	18.650.000
70	0207010633	Kompas	18	Unit	1.620.000
71	0207020105	Microphone	1	Unit	1.450.000
72	0207020106	LOUDSPEAKER	2	Unit	10.100.000
73	0207020120	Facsimile	1	Unit	2.000.000
74	0207032601	Global Position Satelite (GPS)	1	Unit	4.950.000
75	0209010858	Mixer	1	Unit	4.750.000
76	0209011096	Hand Roll	8	Unit	600.000
77	0209011315	Spray Dryer	1	Unit	2.000.000
78	0209012520	Power Supply	1	Unit	4.750.000
79	0209014604	Alat Pemadam Kebakaran	1	Unit	900.000
80	0209014662	Exhause GAS Analyzer	7	Unit	8.750.000
81	0209014695	Hand Counter	20	Unit	1.500.000
82	0209015227	Compas	10	Unit	440.000
83	0209021107	Pita ukuran (meteran)	20	Unit	700.000
84	0101110401	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1510	M2	67.000.000
85	0311010101	Bangunan Gedung Kantor Permanen	200	M2	1.162.993.000
86	0311010101	Bangunan Gedung Kantor Permanen	281	M2	224.695.823
87	0414020101	Bangunan Waduk Pasang Surut	150	M2	110.000.000
88	0517030119	Peta Lokasi	1	Unit	4.750.000
<b>Jumlah</b>					<b>3.379.224.003</b>



### **2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja**

Kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan komitmen yang konsisten terhadap peningkatan mutu layanan public di bidang ketenagaan dan transmigrasi. Secara keseluruhan, kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan telah menunjukkan arah positif dan selaras dengan dengan tujuan pembangunan daerah. Berikut adalah Target, Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja dalam kurun waktu lima tahun terakhir :



Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyerapan tenaga kerja				27%	63%	64%	65%	75%	62,58%	62%	67,46%	71,17%	76,99%	2,32	0,98	1,05	1,09	1,03
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	1	1	1	1	1
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat				0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	1
Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
Jumlah transmigran ditempatkan				10	10	10	5	3	0	0	5	1	1	0	0	0,5	0,2	0,33



**RENSTRA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025-2029**

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja				0	0	0	0	35,35 Juta rp/te naga kerja	35,35 Juta rp/tenaga kerja	35,35 Juta rp/tenaga kerja	35,35 Juta rp/tenaga kerja	35,35 Juta rp/tenaga kerja	37,07 Juta rp/tenag a kerja	0	0	0	0	1,05



### 1. Persentase Penyerapan Tenaga Kerja

Persentase penyerapan tenaga kerja menunjukkan seberapa besar proporsi tenaga kerja yang berhasil terserap ke dalam dunia kerja (dalam dan luar negeri) dibanding total pencari kerja.

Pada tahun 2020 penyerapan tenaga kerja sebesar 62,58% kemudian meningkat hingga tahun 2024 menjadi 76,99%. Peningkatan ini disebabkan oleh jumlah kesempatan kerja yang tersedia dan adanya hubungan baik yang terjalin antara pemerintah dan pihak swasta. Realisasi indikator persentase penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Magetan secara umum telah melampaui target yang telah ditetapkan pada kurun waktu tahun 2020, 2022, 2023 dan 2024. Hanya pada tahun 2021 saja capaian penyerapan tenaga kerja tidak mampu memenuhi target.

### 2. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Tenaga kerja merupakan salah satu input dalam pembangunan suatu wilayah. Tenaga kerja yang terampil akan mendorong kemajuan perkembangan ekonomi suatu wilayah. Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi menunjukkan jumlah peserta pelatihan yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi terhadap jumlah pendaftar pelatihan. Selama kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi sebesar 100%. Capaian indikator kinerja besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi menggambarkan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja yang ada di Kabupaten Magetan sehingga dapat mengurangi pengangguran.

### 3. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat

Pelatihan berbasis Masyarakat merupakan program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan Masyarakat. Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat menunjukkan jumlah peserta pelatihan yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat terhadap jumlah pendaftar pelatihan.



Pelatihan berbasis Masyarakat baru dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan pada tahun 2024 dengan realisasi sebesar 100%. Capaian indicator kinerja besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat menggambarkan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja yang ada di Kabupaten Magetan dan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan Masyarakat.

4. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

Kasus/perselisihan hubungan industrial muncul karena adanya perbedaan pendapat yang menyebabkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat buruh terkait hak, perselisihan kepentingan, perselisihan mengenai pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam Perusahaan. Berdasarkan data pada tahun 2020-2024, semua kasus perselisihan hubungan industrial di Kabupaten Magetan dapat diselesaikan melalui perundingan Bipartit dengan capaian kinerja konsisten 100%.

5. Jumlah Transmigran yang Ditempatkan

Transmigrasi merupakan aktivitas perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang kurang padat. Tujuan dari terselenggaranya transmigrasi adalah untuk pemerataan penduduk serta merupakan upaya dalam pengembangan wilayah.

Berdasarkan data di atas, realisasi jumlah transmigran yang ditempatkan fluktuatif. Pada tahun 2020-2021 capaian transmigran tidak mampu memenuhi target, hal ini disebabkan karena adanya penundaan penempatan transmigrasi sebagai antisipasi dampak wabah pandemic Covid-19.

Pada tahun 2022 terdapat pemberangkatan transmigrasi sebanyak 5 KK dan turun menjadi 1 KK pada tahun 2023-2024. Permasalahan dalam pencapaian target adalah terkait kuota penempatan transmigran yang ditentukan oleh pemerintah pusat.



#### 6. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja menunjukkan jumlah nilai tambah riil yang dihasilkan per tenaga kerja dalam periode tertentu. Indikator ini mengukur efisiensi ekonomi suatu wilayah dalam memanfaatkan tenaga kerja untuk menghasilkan barang dan jasa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tingkat Produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu indikator kinerja yang didapat dari perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun berjalan (atas dasar harga konstan) dibagi jumlah tenaga kerja dikali 100% dengan satuan persen (%), sedangkan pada tahun 2024 terdapat perubahan formula perhitungan menyesuaikan dengan Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2024 yaitu PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) dibagi jumlah tenaga kerja dengan menggunakan satuan Rp/orang.

Indikator Tingkat Produktivitas tenaga kerja menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan mulai tahun 2024 dengan capaian kinerja sebesar 37,07 juta rupiah/orang melampaui target yang telah ditetapkan.

Untuk anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja tahun 2020-2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:



Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>SEBELUM PERUBAHAN</b>																	
<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	124.000.000					108.492.950					87,00					0	0
Penyusunan data base tenaga kerja daerah	95.000.000					89.272.000					93,97					0	0
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	29.698.350					19.220.950					64,72					0	0
<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>	810.258.350					515.416.433					63,61					0	0
Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	30.000.000					29.342.000					97,81					0	0
Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	152.168.500					134.480.350					88,38					0	0
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	155.563.600					151.594.835					97,45					0	0
Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	0					-					0					0	0
Kerjasama pendidikan dan pelatihan	472.526.250					199.999.248					42,33					0	0
<b>Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>	175.350.000					169.125.625					96,45					0	0



## RENSTRA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025-2029

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	40.000.000					38.340.250					95,85					0	0
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	75.000.000					74.037.675					98,72					0	0
Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah	350.000					350.000					100					0	0
Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja	30.000.000					27.829.000					92,76					0	0
Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	30.000.000					28.568.700					95,23					0	0
<b>Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Tenaga Kerja</b>	<b>855.000.000</b>					<b>535.226.415</b>					<b>62,60</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja	305.000.000					-					0					0	0
Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	550.000.000					535.226.415					97,31					0	0
<b>Program pengembangan wilayah transmigrasi</b>	<b>161.922.100</b>					<b>493.036.175</b>					<b>82,78</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	80.000.000					67.212.800					84,02					0	0
Sosialisasi Daerah Penempatan Transmigrasi	31.922.100					27.328.840					85,61					0	0



## RENSTRA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025-2029

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pendaftaran, Seleksi, dan Pelatihan Peningkatan Keterampilan Calon Transmigran	50.000.000					39.493.000					78,99					0	0
Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	0					0	-				0					0	0
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>369.000.000</b>					<b>350.372.196</b>					<b>94,95</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	249.000.000					236.064.296					94,80					0	0
Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	100.000.000					94.972.900					94,97					0	0
Survey Kepuasan masyarakat	20.000.000					19.335.000					96,68					0	0
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>266.000.000</b>					<b>250.129.855</b>					<b>94,03</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	56.000.000					48.491.100					86,59					0	0
Pengadaan Perlengkapan Kantor	105.000.000					103.873.755					98,93					0	0
Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	20.000.000					15.145.000					75,73					0	0
Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	85.000.000					82.620.000					97,20					0	0
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>1.830.000</b>					<b>1.830.000</b>					<b>100</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
Pendidikan dan pelatihan formal	1.830.000					1.830.000					100					0	0



## RENSTRA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025-2029

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	25.000.000					24.303.050					97,21					0	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000					24.303.050					97,21					0	0
<b>SETELAH PERUBAHAN</b>																	
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>		3.224.138.891	3.439.065.801	2.955.099.833	3.457.628.590		2.422.289.877	2.953.613.679	2.885.693.371	3.298.398.093		0,75	0,86	0,98	0,95	0,02	0,08
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		94.997.950	63.497.950	32.048.150	50.000.000		89.052.335	61.973.090	31.097.250	46.747.175		0,94	0,98	0,97	0,93	-0,15	-0,15
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.388.882.368	2.734.637.985	2.365.756.041	2.669.128.590		1.801.139.404	2.294.970.598	2.310.977.532	2.564.060.001		0,75	0,84	0,98	0,96	0,03	0,09
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					37.800.000					32.184.000					0,85	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah		201.761.703	247.328.168	175.906.950	220.396.750		172.159.745	212.239.111	172.281.870	213.814.185		0,85	0,86	0,98	0,97	0,02	0,06
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		286.900.650	312.156.198	311.818.000	329.603.250		269.973.693	307.189.326	303.862.219	294.738.363		0,94	0,98	0,97	0,89	0,04	0,02
Pemilihan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		251.596.220	81.445.500	69.570.692	150.700.000		89.964.700	77.241.554	67.474.500	146.854.369		0,36	0,95	0,97	0,97	-0,12	0,13
<b>Program Perencanaan Tenaga Kerja</b>		0	82.719.970	60.199.750	70.000.000		0	75.785.367	56.642.460	64.625.341		0	0,92	0,94	0,92	-0,04	-0,04



## RENSTRA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025-2029

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		0	82.719.970	60.199.750	70.000.000		0	75.785.367	56.642.460	64.625.341		0	0,92	0,94	0,92	-0,04	-0,04
<b>Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>		<b>1.112.541.270</b>	<b>1.096.208.757</b>	<b>1.219.748.550</b>	<b>1.168.800.000</b>		<b>964.630.440</b>	<b>1.035.646.410</b>	<b>1.177.520.980</b>	<b>1.030.647.945</b>		<b>0,87</b>	<b>0,94</b>	<b>0,97</b>	<b>0,88</b>	<b>0,01</b>	<b>0,02</b>
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		945.760.360	742.333.687	1.174.748.550	1.068.800.000		819.195.040	722.605.500	1.133.735.500	935.956.695		0,87	0,97	0,97	0,88	0,03	0,03
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		56.248.920	157.248.920	0	70.000.000		45.759.550	130.183.250	0	66.423.300		0,81	0,83	0	0,95	0,06	0,10
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		110.531.990	196.626.150	45.000.000	30.000.000		99.675.850	182.857.660	43.785.480	28.267.950		0,90	0,93	0,97	0,98	-0,28	-0,27
<b>Program Penempatan Tenaga Kerja</b>		<b>143.424.275</b>	<b>102.979.825</b>	<b>388.998.550</b>	<b>432.500.000</b>		<b>140.113.500</b>	<b>101.340.910</b>	<b>378.659.405</b>	<b>422.186.316</b>		<b>0,98</b>	<b>0,98</b>	<b>0,97</b>	<b>0,98</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		109.796.525	72.752.675	111.998.950	135.000.000		107.094.250	71.451.410	106.893.700	130.310.950		0,98	0,98	0,95	0,97	0,05	0,05
Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					7.500.000					7.420.000					0,99	0	0
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		9.719.650	9.719.650	259.000.000	205.000.000		9.294.400	9.517.650	254.911.325	203.611.638		0,96	0,98	0,98	0,99	1,14	1,16
Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		23.908.100	20.507.500	17.999.600	85.000.000		23.724.850	20.371.850	16.854.380	80.843.728		0,99	0,99	0,94	0,95	0,37	0,36
<b>Program Hubungan Industrial</b>		<b>150.007.050</b>	<b>113.737.400</b>	<b>267.763.500</b>	<b>257.150.000</b>		<b>139.966.050</b>	<b>109.742.550</b>	<b>91.696.450</b>	<b>252.383.750</b>		<b>0,93</b>	<b>0,96</b>	<b>0,34</b>	<b>0,98</b>	<b>0,14</b>	<b>0,16</b>
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi		61.648.750	52.077.400	204.749.550	247.150.000		59.407.800	52.077.400	29.323.100	242.385.550		0,96	1	0,14	0,98	0,42	0,42



## RENSTRA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025-2029

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
Pengesahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		88.358.300	61.660.000	63.013.950	10.000.000		80.558.250	57.665.150	62.373.350	9.998.200		0,91	0,94	0,99	1	-0,42	-0,41
<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>		<b>284.982.055</b>	<b>160.000.000</b>	<b>97.726.000</b>	<b>72.500.000</b>		<b>91.480.749</b>	<b>156.873.864</b>	<b>95.948.106</b>	<b>51.831.250</b>		<b>0,32</b>	<b>0,98</b>	<b>0,98</b>	<b>0,71</b>	<b>-0,29</b>	<b>-0,13</b>
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		284.982.055	160.000.000		72.500.000		91.480.749	156.873.864	95.948.106	51.831.250		0,32	0,98	0,98	0,71	-0,29	-0,13
<b>Jumlah</b>	<b>2.788.360.450</b>	<b>4.915.093.541</b>	<b>4.994.711.753</b>	<b>4.989.536.183</b>	<b>5.458.578.590</b>	<b>2.447.932.699</b>	<b>3.758.480.616</b>	<b>4.433.002.780</b>	<b>4.686.160.772</b>	<b>5.120.072.695</b>		0,76	0,89	0,94	0,94	0,03	0,08



Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan baik anggaran maupun realisasi anggaran selama periode tahun 2020-2024 mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan anggaran sebesar 0,14 dan pertumbuhan realisasi sebesar 0,16.

#### **2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan**

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian yang terintegrasi dan merupakan tujuan pokok dari pembangunan nasional, sebagaimana termaktub dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak*". Dinas Tenaga Kerja mempunyai peran penting dalam mewujudkan tujuan pokok pembangunan nasional tersebut. Tenaga kerja merupakan subyek dan obyek pembangunan, dengan demikian produktivitas dan daya saing tenaga kerja sangat menentukan atas keberhasilan pembangunan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja telah memberikan pelayanan dengan menysasar para pencari kerja, baik lulusan baru (*fresh graduated*), pekerja formal khususnya disektor industry yang terkena permasalahan ketenagakerjaan baik itu PHK maupun perselisihan hubungan industrial, Pekerja Migran Indonesia (PMI), Pekerja Migran Purna Penempatan, Tenaga Kerja yang berkebutuhan khusus, serta Perusahaan baik itu terkait penempatan tenaga kerja maupun kegiatan hubungan industrial.

#### **2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Memberikan Pelayanan**

Dalam memberikan layanan Dinas Tenaga Kerja tidak akan optimal tanpa peran dan kerjasama dengan mitra Dinas Tenaga Kerja. Kemitraan yang dibangun ini merupakan sinergi penting dalam menciptakan kondisi ketenagakerjaan yang inklusif, adaptif dan berkelanjutan.

Mitra pelayanan Disnaker antara lain yaitu:

1. Badan Pusat Statistik (BPS);
2. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI);
3. BPJS Ketenagakerjaan;
4. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS);



5. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);

## **2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

### **2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja**

Dinamika ketenagakerjaan dalam persaingan global serta era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan digitalisasi dalam berbagai bidang/ sektor mempengaruhi penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, pendayagunaan tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja serta peningkatan kesejahteraan pekerja. Untuk memenangkan persaingan diperlukan kolaboratif, kreatif, inovatif, dinamis, sinergis dan revolusioner.

Permasalahan utama ketenagakerjaan yang masih dihadapi Pemerintah Kabupaten Magetan adalah masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka dan rendahnya perlindungan tenaga kerja, yang antara lain disebabkan:

1. Rendahnya Kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Faktor internal yang mempengaruhi yaitu:

- a. Terbatasnya pelatihan kerja dalam meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terlatih/kompeten
- b. Belum optimalnya pembinaan produktivitas kerja kepada perusahaan kecil dan menengah
- c. Belum Optimalnya pembinaan kepada Bursa Kerja Khusus (BKK)

Faktor eksternal yang mempengaruhi yaitu:

- a. Masih banyaknya tenaga kerja yang belum memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industry dan dunia kerja (dudika)
- b. Belum adanya link and match antara dunia Pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja.

2. Terbatasnya kesempatan kerja terutama sektor formal

Faktor internal yang mempengaruhi yaitu:

- a. Masih terbatasnya tenaga fungsional Pengantar Kerja sehingga perencanaan kebutuhan tenaga kerja dan pembinaan serta pelayanan penempatan tenaga kerja dalam maupun luar negeri belum bisa dilakukan secara optimal



- b. Koordinasi lintas sectoral yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja belum optimal.

Faktor eksternal yang mempengaruhi yaitu:

- a. Jumlah investasi yang masuk tidak sebanding dengan pencari kerja yang tersedia
- b. Belum tersedianya tenaga kerja sesuai kualifikasi sehingga banyak yang belum terserap ke pasar kerja

3. Masih rendahnya perlindungan tenaga kerja

Faktor internal yang mempengaruhi yaitu:

- a. Kurangnya jumlah tenaga fungsional mediator hubungan industrial di Kabupaten Magetan menyebabkan pembinaan hak pekerja pada perusahaan utamanya pengupahan dan jaminan sosial menjadi kurang optimal.

Faktor eksternal yang mempengaruhi yaitu:

- a. Belum semua Perusahaan menerapkan aturan tentang ketenagakerjaan, seperti UMK, syarat kerja, perjanjian kerja, waktu kerja.
- b. Rendahnya kesadaran Perusahaan untuk mengikutsertakan pekerjanya pada program sosial tenaga kerja

4. Terbatasnya kuota pemberangkatan transmigrasi

Faktor eksternal yang mempengaruhi adalah pemberangkatan calon transmigran bergantung pada jumlah kuota yang ditentukan oleh pemerintah pusat.

## **2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah**

### **2.2.2.1. Telaah Isu Global**

Perkembangan ketenagakerjaan di tingkat global saat ini dipengaruhi oleh transformasi ekonomi, teknologi, dan demografi. Revolusi Industri 4.0 dan pergeseran menuju Society 5.0 mendorong perubahan struktur pekerjaan melalui adopsi teknologi digital, otomatisasi, kecerdasan buatan, dan Internet of Things. Tenaga kerja dihadapkan pada kebutuhan keterampilan baru, termasuk digital skills, critical thinking, dan problem solving, yang menjadi prasyarat untuk beradaptasi dalam pasar kerja global. Persaingan tenaga kerja internasional semakin ketat karena mobilitas antarnegara dan standar kompetensi internasional yang tinggi. Di sisi lain, transisi



menuju ekonomi hijau dan pengembangan green jobs menuntut kompetensi baru agar tenaga kerja dapat berperan dalam pembangunan berkelanjutan. Perubahan demografi global, termasuk bonus demografi di negara berkembang dan ageing population di negara maju, memberikan peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Risiko terhadap ketenagakerjaan juga meningkat akibat krisis global, termasuk pandemi, konflik geopolitik, dan perubahan iklim, yang berdampak pada pola kerja dan stabilitas sektor formal maupun informal.

#### **2.2.2.2. Telaah RPJMN Tahun 2025-2029**

Dalam RPJMN 2025–2029, isu ketenagakerjaan menjadi salah satu prioritas utama pembangunan nasional. Pemerintah menekankan pada penguatan sumber daya manusia sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Tantangan utama yang diidentifikasi adalah masih tingginya tingkat pengangguran, terutama pada kelompok usia muda dan lulusan pendidikan menengah/tinggi, serta rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan. Ketidakselarasan antara keterampilan lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri (link and match) masih menjadi masalah pokok. Oleh karena itu, RPJMN menekankan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, pengembangan pelatihan berbasis kompetensi, serta sertifikasi kompetensi tenaga kerja. Selain itu, isu perlindungan tenaga kerja juga mendapat perhatian, khususnya terkait masih rendahnya kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja, maraknya praktik hubungan kerja yang tidak sesuai regulasi, serta masih tingginya kasus kecelakaan kerja. Transformasi ekonomi berbasis teknologi dan ekonomi hijau juga menuntut tenaga kerja untuk beradaptasi dengan keterampilan baru yang ramah lingkungan dan berbasis digital. Dalam konteks ini, penciptaan lapangan kerja di sektor hijau (green jobs), sektor digital, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu prioritas. Pemerintah juga mendorong pengembangan wirausaha baru dan tenaga kerja mandiri sebagai bagian dari strategi memperluas kesempatan kerja.



Secara umum, isu-isu ketenagakerjaan dalam RPJMN 2025–2029 yang relevan dengan lingkup kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan mencakup: peningkatan kualitas dan produktivitas SDM, perluasan kesempatan kerja, penguatan perlindungan tenaga kerja, serta pengembangan lapangan kerja ramah lingkungan dan berbasis digital.

#### **2.2.2.3. Telaah Renstra Disnakertrans Provinsi Jawa Timur**

Di tingkat regional, isu strategis yang diidentifikasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa masih tingginya pengangguran akibat lulusan baru dan korban PHK, ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri, keterbatasan alokasi kuota pelatihan keterampilan, serta perubahan struktur pekerjaan akibat otomatisasi dan teknologi digital. Selain itu, keselamatan kerja masih menjadi prioritas karena adanya kecelakaan kerja, dan kesepahaman antar instansi mengenai sanksi administratif bagi pelanggaran norma ketenagakerjaan belum optimal. Pandemi telah mempercepat tren kerja jarak jauh, sehingga isu manajemen produktivitas dan fleksibilitas bekerja dari rumah menjadi relevan.

#### **2.2.2.4. Telaah RPJPD Kabupaten Magetan Tahun 2025-2045**

RPJPD Kabupaten Magetan menetapkan beberapa isu strategis yang relevan dengan pengembangan ketenagakerjaan, antara lain pengembangan potensi unggulan dalam penguatan daya saing daerah, peningkatan investasi daerah penunjang sektor usaha dan industri, serta sistem pemerintahan terintegrasi berbasis digital. Fokus ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas SDM dan kesempatan kerja melalui pelatihan keterampilan, link and match antara pendidikan dan dunia industri, serta penyediaan fasilitas yang mendukung daya saing tenaga kerja.

#### **2.2.2.5. Telaah KLHS RPJMD Kabupaten Magetan**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Magetan 2025–2029 memuat delapan isu pembangunan berkelanjutan yang harus diperhatikan dalam perencanaan daerah. Dari isu-isu tersebut, terdapat beberapa yang relevan dengan urusan



ketenagakerjaan, khususnya dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat perlindungan tenaga kerja. Adapun isu KLHS yang relevan dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan adalah:

1. Rendahnya daya saing Sumber Daya Manusia

Masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dunia usaha/industri dengan keterampilan pencari kerja. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 4,3%, lebih tinggi dari target nasional 3,8%. Kondisi ini berdampak terhadap tingginya angka kemiskinan dan masih rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) di jenjang menengah.

2. Rendahnya akses jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja/petani

Sebagian besar pekerja, khususnya sektor informal, belum terlindungi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). Hal ini berimplikasi pada rendahnya perlindungan tenaga kerja di Kabupaten Magetan.

3. Belum optimalnya kelembagaan, birokrasi, serta transparansi informasi publik.

Keterbatasan akses informasi tenaga kerja dan minimnya pemanfaatan teknologi informasi menyebabkan layanan pasar kerja belum berjalan optimal.

#### **2.2.2.6. Telaah RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029**

Beberapa isu strategis yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Magetan memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan ketenagakerjaan dan peran Dinas Tenaga Kerja. Pertama, pengembangan potensi unggulan dalam penguatan daya saing daerah menjadi relevan karena peningkatan daya saing SDM sangat menentukan kemampuan tenaga kerja lokal untuk bersaing di sektor industri dan UMKM. Tenaga kerja yang kompeten akan mendorong produktivitas usaha lokal dan memperkuat kontribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kedua, peningkatan investasi daerah penunjang sektor usaha dan industri, khususnya UMKM dan pariwisata, memberikan peluang sekaligus tantangan bagi Disnaker. Investasi yang meningkat



membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri dan pariwisata. Hal ini menegaskan pentingnya link and match antara pendidikan, pelatihan, dan permintaan pasar kerja agar tenaga kerja lokal terserap secara optimal.

Ketiga, perluasan mutu pendidikan menjadi isu relevan karena kualitas pendidikan akan menentukan kemampuan tenaga kerja dalam menguasai keterampilan yang dibutuhkan, terutama keterampilan vokasi, digital, dan kompetensi teknis lain. Perluasan pendidikan berkualitas diharapkan dapat menurunkan angka pengangguran dan menyiapkan tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan revolusi industri 4.0.

Keempat, sistem pemerintahan terintegrasi dan inovatif berbasis digital juga berkaitan dengan Disnaker, terutama dalam hal pengelolaan data ketenagakerjaan, monitoring penempatan kerja, serta penyediaan informasi pasar kerja yang cepat dan akurat. Digitalisasi sistem memungkinkan pelayanan ketenagakerjaan lebih efisien dan transparan, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Secara keseluruhan, isu-isu RPJMD ini menekankan perlunya peningkatan kualitas SDM, penyelarasan pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan industri, serta optimalisasi sistem informasi ketenagakerjaan. Dengan demikian, Disnaker memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian sasaran RPJMD terkait peningkatan daya saing tenaga kerja dan pemenuhan kebutuhan pasar kerja lokal.



**Tabel 2.5. Isu Strategis Perangkat Daerah**

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Penduduk usia produktif/Angkatan kerja sebanyak 425.639 orang dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Magetan sampai dengan Agustus 2024 sebesar 3,28%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja</li> <li>2. Terbatasnya kesempatan kerja terutama sektor formal</li> <li>3. Masih rendahnya perlindungan tenaga kerja</li> <li>4. Kuota transmigrasi ditetapkan oleh pemerintah pusat dan provinsi sehingga kuota sangat terbatas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya daya saing Sumber Daya Manusia</li> <li>2. Rendahnya akses jaminan sosial dan kesejahteraan petani</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Sosial-Ekonomi</li> <li>2. Kerawanan pangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesenjangan keterampilan dan mismatch Pendidikan industry</li> <li>2. Kesejahteraan Masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan SDM berkualitas melalui peningkatan akses Pendidikan, Kesehatan dan standar hidup yang layak dan berkualitas</li> <li>2. Kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja</li> <li>2. Penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan berkualitas</li> <li>3. Peningkatan perlindungan tenaga kerja</li> <li>4. Pengembangan system pelayanan ketenagakerjaan yang inovatif dan berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat</li> </ol>



### BAB III

## TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dari Visi RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 yaitu **“Magetan Nyaman, Maju, Berkelanjutan”**, Dinas Tenaga Kerja mendukung Misi 1 : “SDM ANDAL - Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Andal dan Berdaya Saing Kuat”, Misi 3: “BIROKRASI TANGGAP - Membangun Birokrasi Pemerintahan yang professional, responsif, adaptif, dan transparan”, Misi 4: “MASYARAKAT SEJAHTERA - Meningkatkan Kesejahteraan dengan pengentasan Kemiskinan melalui pemberdayaan Masyarakat, perlindungan sosial dan pembangunan wilayah pedesaan”, dan Misi 5: “EKONOMI KUAT - Peningkatan daya Tarik investasi ekonomi kreatif, pariwisata, perluasan lapangan kerja dan menumbuhkan kewirausahaan untuk mengurangi pengangguran”.

Visi dan Misi Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Bupati Magetan dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



**Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah**

NSPK dan SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah urusan tenaga kerja	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,18%	3,08%	2,98%	2,87%	2,78%	2,67%
Meningkatnya kualitas pendidikan		Meningkatnya akses ke peluang kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	77,10%	77,15%	77,20%	77,25%	77,30%	77,35%
Menurunnya angka pengangguran melalui perluasan lapangan kerja dan menumbuhkan kewirausahaan		Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	37,14 Juta Rp/Tenaga Kerja	37,21 Juta Rp/Tenaga Kerja	37,28 Juta Rp/Tenaga Kerja	37,35 Juta Rp/Tenaga Kerja	37,42 Juta Rp/Tenaga Kerja	37,49 Rp/Tenaga Kerja



NSPK dan SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya akuntabilitas kinerja kinerja pemerintah daerah		Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Tenaga Kerja	Nilai SAKIP	90,17 Nilai	91 Nilai	91,15 Nilai	91,30 Nilai	91,45 Nilai	91,60 Nilai
			Indeks Kepuasan Masyarakat	86 Skor	87,75 Skor	87,85 Skor	87,95 Skor	88,05 Skor	88,15 Skor
Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat									



**3.2. Strategi Perangkat Daerah**

Strategi adalah rencana Tindakan yang komprehensif berisikan Langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, focus, lokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra. Adapun penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.2**  
**Penahapan Renstra Perangkat Daerah**

<b>TAHAP I (2026)</b>	<b>TAHAP II (2027)</b>	<b>TAHAP III (2028)</b>	<b>TAHAP IV (2029)</b>	<b>TAHAP V (2030)</b>
Penguatan regulasi, kelembagaan, dan pemetaan pasar kerja	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	Perluasan akses dan kesempatan kerja dengan mendorong penciptaan lapangan kerja baru di sektor formal dan informal	Peningkatan daya saing dan perlindungan tenaga kerja	Konsolidasi capaian dan keberlanjutan program

TAHAP I (2026)	:	Penguatan regulasi, kelembagaan, dan pemetaan pasar kerja
Implementasi Kebijakan	:	1. Pemetaan kebutuhan tenaga kerja (supply-demand) berdasarkan sektor unggulan Kabupaten Magetan 2. Peningkatan kapasitas LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) sebagai pusat pelatihan kompetensi berbasis kebutuhan pasar kerja
TAHAP II (2027)	:	Peningkatan kualitas SDM tenaga kerja
Implementasi Kebijakan	:	1. Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi (SKKNI) yang relevan



		<p>dengan kebutuhan industry local dan regional</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Sertifikasi kompetensi bagi lulusan pelatihan</li><li>3. Program <i>link and match</i> dengan dunia usaha/dunia industry (DUDI)</li><li>4. Penyelenggaraan pelatihan berbasis masyarakat untuk mendorong wirausaha baru berbasis potensi daerah</li></ol>
TAHAP III (2028)	:	Perluasan akses dan kesempatan kerja dengan mendorong penciptaan lapangan kerja baru di sektor formal dan informal
Implementasi Kebijakan	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fasilitasi penempatan tenaga kerja ke Perusahaan local, regional, dan luar negeri (migran legal)</li><li>2. Pemberdayaan kelompok rentan</li></ol>
TAHAP IV (2029)	:	Peningkatan daya saing dan perlindungan tenaga kerja
Implementasi Kebijakan	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penguatan hubungan industrial yang harmonis dan perlindungan sosial tenaga kerja</li><li>2. Mendorong peningkatan produktivitas melalui penerapan inovasi berbasis teknologi</li></ol>
TAHAP V (2030)	:	Konsolidasi capaian dan keberlanjutan program
Implementasi Kebijakan	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Evaluasi menyeluruh penyerapan tenaga kerja</li><li>2. Mengukur hasil pelatihan yang sudah diberikan (berapa yang terserap kerja atau membuka usaha)</li></ol>



**3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah**

Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

**Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah**

NO	OPERASIONALISASI NPSK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
1	2	3	4	5
1.	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah urusan tenaga kerja	1. Peningkatan Akses Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Sesuai Dengan Potensi Ekonomi 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi Masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan berbasis kompetensi, perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan sektor potensial dan penciptaan iklim usaha yang kondusif, serta peningkatan akses Masyarakat terhadap peluang kerja yang inklusif dan berkelanjutan	1. Optimalisasi pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan fasilitasi uji kompetensi 2. Peningkatan kualitas Lembaga Pelatihan Kerja dengan sertifikasi akreditasi 3. Pemetaan potensi dan Link & match kebutuhan tenaga kerja dengan dunia kerja 4. Fasilitasi penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri yang aman dan legal 5. Pemberdayaan PMI Purna dan keluarga PMI 6. Peningkatan peran serta kelompok rentan (difabel, perempuan kepala keluarga,	



NO	OPERASIONALISASI NPSK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
1	2	3	4	5
			pemuda desa, masyarakat miskin) dalam pelatihan kerja, kewirausahaan, dan penempatan tenaga kerja	
		Perlindungan tenaga kerja rentan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan kepesertaan dan kepatuhan pemberi kerja terhadap program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan</li><li>2. Sosialisasi dan pembinaan kepada pengusaha terkait perlindungan hak normatif pekerja</li><li>3. Penguatan kelembagaan hubungan industrial (KLS Bipartit dan Tripartit)</li></ol>	



## BAB IV

### PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

#### 4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah hasil Cascading dari Tujuan, Sasaran, Outcome dan Output

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan Tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan. Program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran Langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya Akses ke Peluang Kerja, Dinas Tenaga Kerja melaksanakan program sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja
2. Program Penempatan Tenaga Kerja
3. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja melaksanakan program sebagai berikut:

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Program Hubungan Industrial

Sedangkan untuk mencapai sasaran kinerja Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Tenaga Kerja melalui program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Indicator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui Gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indicator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh



mana pencapaian tujuan dan sasaran. Berikut disajikan teknik perumusan program/kegiatan/sub kegiatan Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025-2029 sebagai berikut:



**Tabel 4.1**  
**Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah**

<b>NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Outcome</b>	<b>Output</b>	<b>Indikator</b>	<b>Program/Kegiatan/Sub kegiatan</b>	<b>Ket .</b>
Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah urusan tenaga kerja	<b>Meningkatnya penyerapan tenaga kerja</b>				<b>Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja</b>		
Meningkatnya kualitas pendidikan		<b>Meningkatnya akses ke peluang kerja</b>			<b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja</b>		
Menurunnya angka pengangguran melalui perluasan lapangan kerja dan menumbuhkan kewirausahaan			<b>Meningkatnya persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja</b>		<b>Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah				<b>Tersedianya dokumen</b>	<b>Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Yang Disusun</b>	<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket .
				perencanaan Tenaga Kerja			
Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat						Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	
						Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri dan luar negeri	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
				Terlaksananya pelayanan antar kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Pelayanan Antar Kerja	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	



RENSTRA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket .
					Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Pelayanan Antar Kerja	
					Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Perluasan Kesempatan Kerja	
				<b>Terlaksananya monitoring dan pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)</b>	<b>Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang dilakukan monitoring dan pembinaan</b>	<b>Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket .
					Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	
				<b>Tersedianya lowongan kerja</b>	<b>Jumlah Penyediaan Lowongan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	
					Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	
					Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Job Fair /Bursa Kerja	
				<b>Terlaksananya pelatihan dan perlindungan PMI (Pra dan</b>	<b>Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang Mendapatkan</b>	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket .
				Purna Penempatan)	Pelatihan dan Pelindungan		
					Jumlah CPMI / PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)	
					Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna Penempatan	
			Meningkatnya Persentase transmigran yang ditempatkan		Persentase Transmigran yang ditempatkan	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
				Terlaksananya Penempatan Transmigrasi yang Berkompeten	Jumlah Penempatan Transmigrasi yang Berkompeten	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket .
					Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		<b>Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja</b>			<b>Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja</b>		
			<b>Meningkatnya persentase peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi</b>		<b>Persentase peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	
				<b>Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi</b>	<b>Jumlah peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi</b>	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket .
					Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
					Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	
					Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket .
				Terlaksananya pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Terakreditasi	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
					Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
				Tersedianya dokumen hasil pengukuran produktivitas tenaga kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti Kegiatan Peningkatan dan Pengukuran Produktivitas	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket .
			Meningkatnya persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
				Terlaksananya pengesahan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Sama yang didaftarkan	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan dan Perjanjian Kerja Bersama yang didaftarkan	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket .
					Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	
				<b>Terlaksananya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial</b>	<b>Jumlah penyelesaian kasus ketenagakerjaan secara bipartit</b>	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	
					Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket .
					Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah LKS Tripartit yang dibina	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	
					Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket .
		Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Tenaga Kerja			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
					Tingkat Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah		
			Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui birokrasi yang profesional serta pelayanan administrasi publik yang efektif dan efisien pada perangkat daerah pengampu urusan bidang tenaga kerja		Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya dokumen perencanaan,	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket .
				<b>penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu</b>	<b>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				<b>Terpenuhinya layanan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu</b>	<b>Persentase Deviasi Serapan Anggaran Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket .
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	
				<b>Terkelolanya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik daerah yang di Kelola</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				<b>Terpenuhinya layanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun</b>	<b>Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket .
				sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar			
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasar tugas dan fungsi	
					Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya layanan administrasi umum	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket .
				perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar			
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket .
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				<b>Terpenuhinya kebutuhan penunjang operasional pemerintah daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket .
					Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				<b>Ketersediaan dan keberfungsian aset daerah yang optimal untuk mendukung kegiatan pemerintahan</b>	<b>Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah</b>	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket .
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	



**RENSTRA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025-2029**

<b>NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Outcome</b>	<b>Output</b>	<b>Indikator</b>	<b>Program/Kegiatan/Sub kegiatan</b>	<b>Ket .</b>
					Dipelihara/Direhabilitasi		



#### **4.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah mengacu pada Nomenklatur**

Untuk melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan lima tahun kedepan, maka disusunlah rencana program, kegiatan, sub kegiatan, target kinerja dan pagu indikatif tahun 2025-2029 tersaji dalam tabel 4.2 berikut:



Tabel 4.2

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR	BASEL INE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN Dinas Tenaga Kerja terhadap layanan kesekretariat an Dinas Tenaga Kerja    Indeks		83,50	3.410.386.503										
OUTCOME : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui birokrasi yang profesional serta pelayanan administrasi publik yang efektif dan efisien pada Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariat an    skor	82,62			84,00	3.575.331.358	84,50	3.683.000.000	85,00	3.793.490.000	85,50	3.909.000.000	86,00	4.024.100.000
	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran   %	97,44			97,45		97,46		97,47		97,48		97,49	



RENSTRA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Pengampu Urusan Bidang Tenaga Kerja														
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu   Dokumen		21	10.920.000										
OUTPUT: Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   Dokumen	21			42	28.059.150	42	35.779.000	42	37.000.000	42	72.000.000	42	73.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
Output: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   Dokumen	13	13	3.990.000	11	13.059.150	11	15.779.000	11	16.000.000	11	50.000.000	11	50.000.000



**RENSTRA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025-2029**

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Output: Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    Laporan	8	8	6.930.000	31	15.000.000	31	20.000.000	31	21.000.000	31	22.000.000	31	23.000.000
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase serapan anggaran perangkat daerah   %</b>		<b>89</b>	<b>2.872.674.453</b>										
<b>Output: Terpenuhinya layanan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu</b>	<b>Persentase Deviasi Serapan Anggaran Perangkat Daerah   %</b>	<b>6,20</b>			<b>6,19</b>	<b>2.994.472.208</b>	<b>6,18</b>	<b>3.069217.000</b>	<b>6,17</b>	<b>3.160.990.000</b>	<b>6,16</b>	<b>3.256.587.000</b>	<b>6,15</b>	<b>3.359.100.000</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
Output: Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN    Orang/Bulan	302	308	2.871.384.153	308	2.991.472.208	406	3.066.217.000	406	3.157.900.000	406	3.253.087.000	406	3.351.600.000



**RENSTRA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025-2029**

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD														
Output: Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD    Laporan	61	61	1.290.300	13	3.000.000	13	3.000.000	13	3.090.000	13	3.500.000	13	7.500.000
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>														
Output: Terkelolanya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik daerah yang di kelola    Laporan	-			-		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000



**RENSTRA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025-2029**

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
Output: Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD    Laporan	-			-		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pegawai yang menerima pelayanan kepegawaian sesuai prosedur</b>		<b>32</b>	<b>36.317.350</b>										
Output: Terpenuhinya layanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur    Orang	30			35	31.250.000	35	32.187.500	35	35.000.000	35	37.000.000	35	38.000.000
Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasar tugas dan fungsi			32											



**RENSTRA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025-2029**

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Output: Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan   Orang	2			4	5.000.000	4	5.150.000	4	6.000.000	4	7.000.000	4	8.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan														
Output: Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan   Orang	30	32		35	26.250.000	35	10.000.000	35	10.000.000	35	10.000.000	35	10.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
Output: Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan   Orang	-			0	0	35	17.037.500	35	19.000.000	35	20.000.000	35	20.000.000



**RENSTRA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025-2029**

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Output: Terpenuhiya layanan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah    Paket	12	12	138.614.500	12	160.250.000	12	164.007.500	12	175.500.000	12	160.913.000	12	170.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Output: Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   Paket	2	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.150.000	2	6.000.000	2	6.500.000	2	7.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														



**RENSTRA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025-2029**

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Output: Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan    Paket	12	12	55.458.600	4	34.000.000	4	35.020.000	4	36.000.000	4	21.413.000	4	30.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
Output: Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan   Paket	2	2	14.708.000	8	14.500.000	8	14.935.000	8	15.000.000	8	10.000.000	8	10.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
Output: Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   Paket	12	12	19.963.350	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
Output: Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan    Paket	6	6	7.704.550	6	15.000.000	6	15.000.000	6	15.500.000	6	15.000.000	6	15.000.000



**RENSTRA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025-2029**

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
Output: Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan    Dokumen	12	12	10.780.000	12	11.750.000	12	12.102.500	12	13.000.000	12	13.000.000	12	13.000.000
Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
Output: Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD    Laporan	12	12	25.000.000	12	60.000.000	12	61.800.000	12	70.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>														
<b>Output: Terpenuhinya kebutuhan penunjang operasional pemerintah daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>273.360.200</b>	<b>12</b>	<b>285.000.000</b>	<b>12</b>	<b>288.220.000</b>	<b>12</b>	<b>290.000.000</b>	<b>12</b>	<b>287.500.000</b>	<b>12</b>	<b>288.000.000</b>



**RENSTRA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025-2029**

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR	BASEL INE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
	<b>Urusan Pemerintahan Daerah    Laporan</b>													
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
Output: Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan    Laporan	12	12	40.000.000	12	40.000.000	12	41.200.000	12	42.000.000	12	42.500.000	12	43.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
Output: Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan    Laporan	8	8	10.960.100	8	11.000.000	8	11.000.000	8	11.000.000	8	11.000.000	8	11.000.000



**RENSTRA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025-2029**

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR	BASEL INE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
Output: Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disesiakan   Laporan	12	12	222.400.100	12	234.000.000	12	236.020.000	12	237.000.000	12	234.000.000	12	234.000.000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik yang Dipelihara   Unit</b>		<b>15</b>	<b>78.500.000</b>										
<b>Output: Ketersediaan dan keberfungsian aset daerah yang optimal untuk mendukung kegiatan pemerintahan</b>	<b>Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah   Unit</b>	<b>12</b>			<b>12</b>	<b>76.300.000</b>	<b>12</b>	<b>88.589.000</b>	<b>12</b>	<b>90.000.000</b>	<b>12</b>	<b>90.000.000</b>	<b>12</b>	<b>91.000.000</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														



**RENSTRA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025-2029**

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Output: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya    Unit	2	2	47.000.000	2	47.000.000	2	48.410.000	2	49.000.000	2	49.000.000	2	49.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Output: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   Unit	11	11	12.500.000	10	10.500.000	10	10.815.000	10	11.000.000	10	11.000.000	10	11.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														



**RENSTRA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025-2029**

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR	BASEL LINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
Output: Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi   Unit	-			0	0	1	19.364.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	21.000.000
Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Output: Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi   Unit	1	2	19.000.000	1	18.800.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja   %</b>		<b>100</b>	<b>106.606.800</b>										
<b>OUTCOME : Meningkatnya persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja</b>	<b>Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja  %</b>				<b>100</b>	<b>55.000.000</b>	<b>100</b>	<b>56.650.000</b>	<b>100</b>	<b>58.350.000</b>	<b>100</b>	<b>60.000.000</b>	<b>100</b>	<b>60.000.000</b>



**RENSTRA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025-2029**

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR	BASEL INE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)														
Output: Tersedianya dokumen perencanaan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Yang Disusun   Dokumen	1	1	106.606.800	1	55.000.000	1	56.650.000	1	58.350.000	1	60.000.000	1	60.000.000
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro														
Output: Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro   Dokumen	-	1	62.389.350	-	-					1	60.000.000		
Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro														
Output: Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro   Orang	20	20	44.217.450	20	55.000.000	20	56.650.000	20	58.350.000			20	60.000.000
<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten</b>   %		<b>100</b>	<b>1.178.523.650</b>										



**RENSTRA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025-2029**

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
<b>OUTCOME : Meningkatnya persentase peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi</b>	<b>Persentase peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi   %</b>				100	605.000.000	100	623.150.000	100	641.845.000	100	661.100.000	100	680.933.000
<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>Persentase Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi   %</b>		100	1.132.742.400										
<b>Output: Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi</b>	<b>Jumlah peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi    Orang</b>				20	544.000.000	20	560.320.000	30	577.132.000	30	594.445.000	40	612.278.000
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														
Output: Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis	176	280	1.122.577.400	120	530.000.000	120	545.900.000	140	562.277.000	140	579.148.000	160	596.522.000



**RENSTRA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025-2029**

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
berdasarkan Klaster Kompetensi	Kompetensi pada Tahun n     Orang													
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja														
Output: Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n     Lembaga	12	10	6.165.000	6	9.000.000	6	9.270.000	7	9.550.000	7	9.834.000	8	10.129.000
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja														
Output: Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana	1	2	4.000.000	1	5.000.000	1	5.150.000	1	5.305.000	1	5.463.000	1	5.627.000



**RENSTRA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025-2029**

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Pelatihan Kerja    Unit													
<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>														
Output: Terlaksananya pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	<b>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Terakreditasi    Lembaga</b>	7	7	25.825.600	7	35.000.000	8	36.050.000	8	37.131.000	8	38.245.000	9	39.392.000
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta														
Output: Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina    Lembaga	12	20	25.825.600	20	35.000.000	20	36.050.000	20	37.131.000	20	38.245.000	20	39.392.000
<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>														
Output: Tersedianya dokumen hasil pengukuran	<b>Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti Kegiatan</b>	20	30	19.955.650	20	26.000.000	20	26.780.000	20	27.582.000	20	28.410.000	20	29.263.000



**RENSTRA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025-2029**

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR	BASEL INE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
produktivitas tenaga kerja	Peningkatan dan Pengukuran Produktivitas    Orang													
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja														
Output: Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah    Dokumen	1	1	19.955.650	1	26.000.000	1	26.780.000	1	27.582.000	1	28.410.000	1	29.263.000
<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja    Persen</b>		<b>100</b>	<b>423.292.100</b>										
<b>OUTCOME: Meningkatkan penempatan tenaga kerja</b>	<b>Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri dan</b>	<b>76,99</b>			<b>78,00</b>	<b>412.300.000</b>	<b>78,50</b>	<b>424.669.000</b>	<b>79,00</b>	<b>437.410.000</b>	<b>79,50</b>	<b>450.532.000</b>	<b>80,00</b>	<b>464.048.000</b>



**RENSTRA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025-2029**

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Iuar negeri     %													
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Fasilitas Pelayanan Antar Kerja     Orang		1500	177.625.400										
Output: Terlaksananya pelayanan antar kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Pelayanan Antar Kerja     Orang	3560			2500	142.500.000	2520	146.274.000	2530	150.995.000	2540	154.500.000	2550	160.000.000
Pelayanan Antar Kerja														
Output: Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL     Orang	2741	1500	34.562.950	1500	44.500.000	1510	45.000.000	1515	46.000.000	1520	47.000.000	1525	48.000.000
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja														



**RENSTRA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025-2029**

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Output: Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan     Orang	30	60	19.535.350	200	28.000.000	200	29.000.000	200	30.995.000	200	32.000.000	200	34.000.000
Perluasan Kesempatan Kerja														
Output: Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja     Orang	30	65	123.527.100	30	70.000.000	30	72.274.000	30	74.000.000	30	75.500.000	30	78.000.000
<b>Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS yang Mendapatkan Izin, Pengawasan dan Pengendalian LPTKS     Lembaga</b>		<b>5</b>	<b>1.000.000</b>										



**RENSTRA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025-2029**

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATA N/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR	BASEL INE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGE ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE ET	PAGU	TARGE T	PAGU
Output: Terlaksananya monitoring dan pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang dilakukan monitoring dan pembinaan     Lembaga	5			5	2.800.000	5	3.000.000	5	3.000.000	5	3.500.000	5	3.500.000
Pengawasan dan Pengendalian LPTKS														
Output: Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku     Lem baga	5	5	1.000.000	5	2.800.000	5	3.000.000	5	3.000.000	5	3.500.000	5	3.500.000
<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>														
Output: Tersedianya lowongan kerja	Jumlah Penyediaan Lowongan Informasi Pasar Kerja     Lowongan	407	500	192.814.000	2000	196.500.000	2010	202.395.000	2020	208.415.000	2030	214.786.000	2040	220.638.000



**RENSTRA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025-2029**

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online														
Output: Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)    Orang	1221	2500	1.592.000	2500	1.500.000	2510	1.545.000	2520	1.600.000	2530	1.786.000	2540	2.000.000
Job Fair /Bursa Kerja														
Output: Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja    Orang	536	750	191.222.000	700	195.000.000	700	200.850.000	700	206.815.000	700	213.000.000	700	218.638.000
<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Calon Pekerja Migran (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Dilindungi dan Ditingkatkan</b>		<b>25</b>	<b>51.852.700</b>										



**RENSTRA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025-2029**

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Kompetensinya   Orang													
Output: Terlaksananya pelatihan dan perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan)	Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang Mendapatkan Pelatihan dan Pelindungan   Orang	45			80	70.500.000	80	73.000.000	80	75.000.000	80	77.746.000	80	79.910.000
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)														
Output: Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI / PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya   Orang	25	25	22.852.700	60	36.000.000	60	37.000.000	60	38.000.000	60	39.500.000	60	40.518.000



**RENSTRA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025-2029**

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR	BASEL INE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna Penempatan														
Output: Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan   Orang	20	20	29.000.000	20	34.500.000	20	36.000.000	20	37.000.000	20	38.246.000	20	39.392.000
<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Persentase Penyelesaian Perselisihan Kasus Ketenagakerja an   %</b>		<b>100</b>	<b>625.427.130</b>										
<b>OUTCOME: Meningkatnya persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)</b>	<b>Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerja an)   %</b>	<b>39,13</b>			<b>40</b>	<b>365.000.000</b>	<b>45</b>	<b>375.950.000</b>	<b>45</b>	<b>387.230.000</b>	<b>50</b>	<b>398.847.000</b>	<b>50</b>	<b>410.812.000</b>



**RENSTRA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025-2029**

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata Kelola yang baik    Perusahaan		5	1.088.400										
Output: Terlaksananya pengesahan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Sama yang didaftarkan	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan dan Perjanjian Kerja Bersama yang didaftarkan    Dokumen	9			11	5.000.000	12	5.000.000	13	5.000.000	14	5.000.000	15	5.000.000
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														
Output: Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang	1	1	1.088.400	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000



RENSTRA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan   Laporan													
<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>														
<b>Output: Terlaksananya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial</b>	<b>Jumlah penyelesaian kasus ketenagakerjaan secara bipartit   Perkara</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>624.338.730</b>	<b>4</b>	<b>360.000.000</b>	<b>4</b>	<b>370.950.000</b>	<b>4</b>	<b>382.230.000</b>	<b>4</b>	<b>393.847.000</b>	<b>4</b>	<b>405.812.000</b>
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														



**RENSTRA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025-2029**

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Output: Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah   Perkara	40	40	40.677.250	40	33.000.000	40	33.000.000	40	35.000.000	40	37.000.000	40	39.000.000
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
Output: Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan   Perkara	1	4	5.298.450	4	7.000.000	4	4.950.000	4	4.950.000	4	4.950.000	4	4.950.000



**RENSTRA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025-2029**

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR	BASEL INE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota														
Output: Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina   Lembaga	1	1	36.068.550	1	70.000.000	1	63.000.000	1	52.280.000	1	41.897.000	1	31.862.000
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														
Output: Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja   Orang	1192	12344	542.294.480	2440	250.000.000	2.640	270.000.000	2.840	290.000.000	3.040	310.000.000	3.060	330.000.000
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>														
<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>Persentase Penempatan Transmigran yang Terseleksi dan</b>		<b>0</b>	<b>0</b>										



**RENSTRA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025-2029**

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Terlatih     Persen													
<b>OUTCOME: Meningkatkan Persentase transmigran yang ditempatkan</b>	<b>Persentase Transmigran yang ditempatkan     Persen</b>	<b>100</b>			<b>100</b>	<b>65.000.000</b>	<b>100</b>	<b>66.950.000</b>	<b>100</b>	<b>68.960.000</b>	<b>100</b>	<b>71.000.000</b>	<b>100</b>	<b>73.130.000</b>
<b>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Calon Transmigran yang Terseleksi, Mendapatkan Pelatihan, dan Diberangkatkan     KK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>										
<b>Output: Terlaksananya Penempatan Transmigrasi yang Berkompeten</b>	<b>Jumlah Penempatan Transmigrasi yang Berkompeten     KK</b>	<b>1</b>			<b>2</b>	<b>65.000.000</b>	<b>2</b>	<b>66.950.000</b>	<b>2</b>	<b>68.960.000</b>	<b>2</b>	<b>71.000.000</b>	<b>2</b>	<b>73.130.000</b>
Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														



**RENSTRA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025-2029**

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Output: Terlaksananya Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan  KK	1	0	0	2	65.000.000	2	66.950.000	2	68.960.000	2	71.000.000	2	73.130.000
<b>TOTAL</b>						<b>5.077.631.358</b>		<b>5.230.369.000</b>		<b>5.387.285.000</b>		<b>5.550.479.000</b>		<b>5.713.023.000</b>



### 4.3. Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah merupakan rincian program pemerintah yang disusun atas prioritas pembangunan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. program pembangunan daerah menjabarkan nomenklatur program penganggaran yang disertai dengan target kinerja dan target penganggaran. Konstruksi dalam penyusunan program pembangunan daerah selain didasarkan atas prioritas pembangunan juga mempertimbangkan aspek pendanaan sehingga skala prioritas dalam penentuan penganggaran program pembangunan perlu dilakukan secara seksama agar dapat mengoptimalkan sumber pendanaan pemerintah terhadap tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai. Berikut program prioritas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan.

**Tabel 4.3**  
**Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program**  
**Prioritas Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Meningkatnya persentase lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi</b>	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Mendukung sasaran RPJMD: 1. Meningkatnya kualitas pendidikan 2. Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat
2	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>Meningkatnya penempatan tenaga kerja</b>	<b>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
			Perluasan Kesempatan Kerja	Mendukung sasaran RPJMD: Menurunnya Angka Pengangguran melalui perluasan lapangan kerja dan menumbuhkan kewirausahaan
			Job Fair /Bursa Kerja	Mendukung sasaran RPJMD: Menurunnya Angka Pengangguran melalui perluasan lapangan kerja dan menumbuhkan kewirausahaan
			Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna Penempatan	Mendukung sasaran RPJMD: Menurunnya Angka Pengangguran melalui perluasan lapangan kerja dan menumbuhkan kewirausahaan
3	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Meningkatnya persentase Perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Sakal Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)</b>	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	
			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Mendukung sasaran RPJMD:



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
			dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat

**4.4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah**

Indicator kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan berlandaskan pada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indicator kinerja yang tercantum di RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan untuk lima tahun ke depan. Penetapan indicator kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD. Berikut tersaji Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan.



Tabel 4.4

## Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	77,10	77,15	77,20	77,25	77,30	77,35	
2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rp/Tenaga Kerja	37,14	37,21	37,28	37,35	37,42	37,49	
3	Nilai SAKIP	Nilai	90,17	91	91,15	91,30	91,45	91,60	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	86	87,75	87,85	87,95	88,05	88,15	



#### **4.5. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

Target kinerja penyelenggaraan urusan tenaga kerja Kabupaten Magetan tahun 2025-2029 ditetapkan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mencerminkan prioritas pembangunan ketenagakerjaan daerah, sekaligus memperkuat kontribusi perangkat daerah terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Berikut IKK Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan.



**Tabel 4.5**  
**Indikator Kinerja Kunci**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	28	28,15	28,30	28,45	28,60	28,75	
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rp/Tenaga Kerja	37,14	37,21	37,28	37,35	37,42	37,49	



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	40	40	45	45	50	50	
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	77,50	78	78,50	79	79,50	80	



## BAB V PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Magetan berlaku selama lima tahun dari tahun 2025-2029. Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Renstra Dinas Tenaga Kerja ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 205-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap Masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Magetan.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN MAGETAN



**Drs. BREE RIDWAN, M.M**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196605161986031005